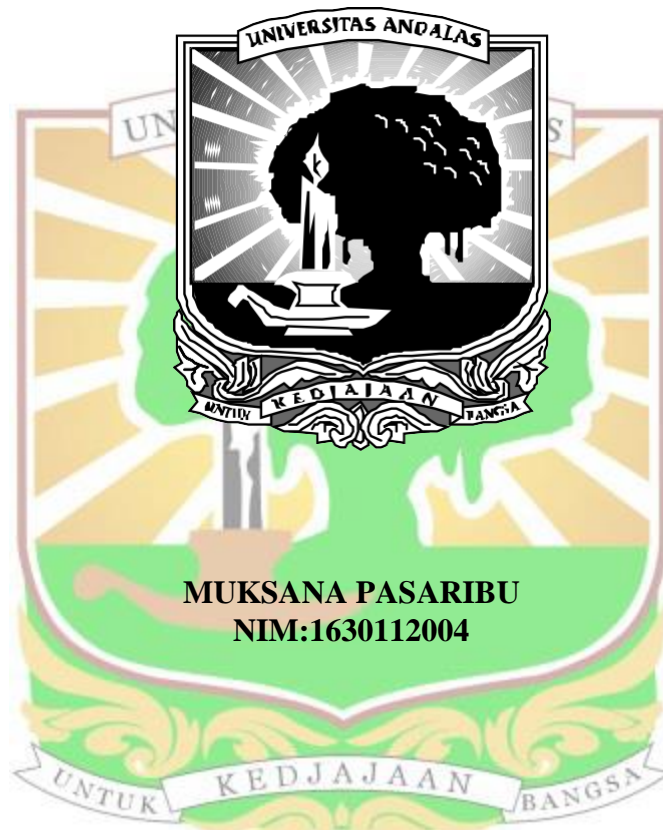


**PENEGAKAN HUKUM JINAYAT
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN
QANUN
DI PROVINSI ACEH**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum



**MUKSANA PASARIBU
NIM:1630112004**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM JINAYAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN QANUN DI PROVINSI ACEH

Muksana Pasaribu, 1630112004, Program Studi Doktor Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2023.

Setiap tahun angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus terjadi sepanjang Januari sampai Mei 2023. Jika diperinci berdasarkan jenisnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Sedangkan di Aceh menurut data DP3A tercatat sejumlah kasus kekerasan anak sebanyak 679 kasus. Masih dengan kasus pelecehan seksual yang tertinggi sebanyak 134 kasus, disusul kasus sodomi sebanyak 113 kasus dan pemukulan fisik sebanyak 111 kasus yang terjadi sejak Januari-November 2022. Kurangnya pengawasan orang tua, kepedulian masyarakat yang rendah serta hukum tanpa efek jera menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan qanun jinayat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh serta efektivitasnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3A Aceh, terlihat ada peningkatan terus menerus yang terjadi sehingga dapat disimpulkan Qanun belum efektif dalam memberantas kekerasan terhadap anak di Aceh. Hal ini karena terdapatnya dualisme aturan hukum yang terjadi di Aceh yaitu Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Qanun Jinayat. Ancaman hukuman dalam UUPA lebih berat dan bersifat kumulatif. Berbeda dengan ancaman hukuman dalam Qanun Jinayat yang bersifat alternatif. Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah sanksinya dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Hal tersebut agaknya kurang efektif dalam menekan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Aceh.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Jinayat, Tindak Pidana Kekerasan, Qanun.

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF JINAYAT LAW IN CRIMES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN BASED ON QANUN IN THE PROVINCE OF ACEH

Muksana Pasaribu, 1630112004, Doctor of Law Studies Programme,
Faculty of Law, Andalas University, 2023.

Every year the number of violence against children in Indonesia continues to increase, according to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) the number of cases of violence and criminal acts against children in Indonesia reached 9,645 cases from January to May 2023. When broken down by type, cases of sexual violence against children ranked first with 4,280 cases. Then followed by physical violence 3,152 cases and psychological violence 3,053 cases. Meanwhile, in Aceh, according to DP3A data, there were 679 cases of child abuse. Still with the highest cases of sexual abuse with 134 cases, followed by sodomy cases with 113 cases and physical beatings with 111 cases that occurred from January-November 2022. Lack of parental supervision, low public awareness and laws without deterrent effects are factors that cause violence against children. This research aims to find out how the handling of qanun jinayat in criminal acts of violence against children in Aceh Province and its effectiveness in handling criminal acts of violence against children in Aceh Province. This research is normative legal research or normative juridical. Normative legal research only uses secondary data. Secondary data collection is done through documentation studies or *library research* studies. Based on data obtained from DP3A Aceh, it can be seen that there is a continuous increase that occurs so that it can be concluded that the Qanun has not been effective in eradicating violence against children in Aceh. This is because there is dualism in the rule of law that occurs in Aceh, namely the Law on Child Protection (UUPA) and Qanun Jinayat. The punishment in UUPA is more severe and cumulative. In contrast to the punishment in Qanun Jinayat which is alternative. Qanun Jinayat, is much lighter / lower in sanctions compared to the sanctions stipulated in the Child Protection Law (UUPA). This seems less effective in suppressing the increase in cases of violence against children in Aceh.

Keywords: Enforcement of Jinayat Law, Violent Crime, Qanun